

**PELAKSANAAN KEWENANGAN SATPOL PP DALAM
PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 1997
TENTANG KETERTIBAN UMUM STUDI DI KELURAHAN
SUNGAI PAKNING KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN
BENGKALIS**

Oleh

Muhammad Nurzamani dan Moris Adidi Yogya

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR

ABSTRACT

Social order is part of the ideals of the nation, with the situation of life in the community order would minimize social conflict. In connection with this study that raised an issue related to the social order. in the village of Bukit Batu subdistrict Kelurahan sungai pakning are social phenomena that could disrupt public order, livestock raising by way of removable without any safeguards, it received special attention and UPIKA district of government (District Leadership Element). Then out a policy in the form of circular regulating the control animals in District rocks. Policies that content rules and ban cattle raising by way of removable and no maintenance is at the spotlight in this skripsi research. Theory concept told by Ripley in book eran agus purwanto there are several indicators of research is, determine the policy goals and objectives, out policy, implementor, target group, the direct impact, medium impact, long term impact, implementing performance. By using research method quantitative and qualitative with observation technique and questionnaire question, interview by using informan key as information guest speaker and also through method of purposive sampling obtained from supplement informan. Result of this research is implementation of the civil service authority police force in the enforcement of local regulations numer 27 of 1997 on public order in the vilage studies sungai pakning districts rock bengkalis ,according to the lives stock owners are quite done well with the percentage of 50.58% and answers from the civil service police unit with a percentage of 71.11% performing well. And still there are inhibiting factors that affect the success of the policy that created, either of the factors that carry out policing (internal factors)as well as objects in the curb, and location of the area where the research problem (external factors) and must be repaired and reviewed in order to create on orderly atmosphere in public life.

Keywords: implementation, public policy, Authority.

ABSTRAK

Ketertiban sosial merupakan bagian dari cita-cita bangsa, dengan adanya suasana hidup tertib dimasyarakat akan meminimalisir terjadinya konflik sosial. Sehubungan dengan itu penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan yang terkait dengan ketertiban sosial. di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan Bukit Batu terdapat fenomena sosial yang bisa mengganggu ketertiban umum, pemeliharaan hewan ternak dengan cara dilepas tanpa ada penjagaan, hal ini mendapat sorotan khusus dari pemerintah kecamatan dan UPIKA (Unsur Pimpinan Kecamatan). Kemudian keluar sebuah kebijakan berupa surat edaran yang mengatur tentang penertiban hewan ternak dikecamatan bukit batu. Kebijakan yang isinya aturan serta larangan pemeliharaan ternak dengan cara dilepas dan tanpa ada penjagaan inilah yang menjadi sorotan didalam penelitian skripsi ini. Konsep teori yang dikemukakan oleh ripley dalam buku agus eran purwanto ada beberapa indikator dalam penelitian ini adalah, menentukan kebijakan tujuan dan sasaran, keluaran kebijakan, implementor, kelompok sasaran , dampak langsung, dampak jangka menengah, dampak jangka panjang, dan kinerja implementasi. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan teknik observasi dan angket koesioner, wawancara dengan menggunakan key informan sebagai narasumber informasi serta melalui metode sampling purposif diperoleh dari informan susulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum diKelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis menurut masyarakat pemilik tenak adalah cukup terlaksana dengan baik dengan persentase 50.58%, dan jawaban dari satpol pp sendiri dengan persentase 71.11% terlaksana dengan baik, dan karena masih ada terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi

keberhasilan kebijakan yang dibuat, baik itu faktor dari yang melaksanakan penertiban (faktor internal) maupun objek yang di tertibkan dan lokasi daerah tempat permasalahan penelitian (faktor eksternal). dan harusnya diperbaiki dan ditinjau ulang agar terciptanya suasana tertib didalam kehidupan bermasyarakat.
Kata Kunci : Pelaksanaan , Kebijakan Publik dan Kewenangan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis adalah sebagai kelompok pelaksana / eksekutor dalam melakukan penertiban dengan memperhatikan keadaan Kelurahan Sungai Pakning yang masih banyak hewan ternak dan unggas berkeliaran di perkarangan

umum / jalan lalu lintas hal inilah yang mendasari pemerintah kecamatan bukit batu bekerja sama dengan unsur pimpinan kecamatan dan PT. pertamina mengeluarkan suatu bentuk surat edaran pada tanggal 21 januari 2011 dengan nomor surat 31/TIB/300/2011. Memutuskan membentuk tim bersama dalam upaya melakukan penertiban hewan ternak/ unggas yang dilepaskan begitu saja oleh sipemilik ternak.

Tabel 1: Daftar Observasi Peneliti Kepemilikan Hewan Ternak Dan Unggas Di Setiap Dusun Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu.

No	jenis hewan ternak dan unggas	Dusun p. Asal	Dusun sukoharjo	Dusun sukajadi	Dusun sukaramai	Total
1	Sapi	14	20	4	9	47
2	Kerbau	7	4	4	12	27
3	Kambing	33	20	25	19	97
4	Ayam kampung	126	56	43	45	270
5	Bebek	93	67	33	37	230
	Jumlah	273	167	109	122	671

Sumber : Rekapitulasi Dasar Kepemilikan Hewan Ternak Dan Unggas Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Olahan 2014

Dari data di atas dapat di lihat daftar jumlah kepemilikan hewan ternak dan unggas di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu yang terdiri atas beberapa dusun di antaranya dusun pakning asal, dusun sukoharjo, dusun sukajadi, dan dusun sukaramai. Jumlah kepemilikan hewan ternak dan unggas yang di tinjau secara keseluruhan , di dusun pakning asal berjumlah 273 daftar kepemilikan hewan ternak dan unggas, di dusun sukoharjo berjumlah 167, di dusun sukajadi berjumlah 109, sedangkan dusun sukaramai daftar kepemilikan

hewan ternak dan unggas secara berjumlah 122 . daftar total kepemilikan hewan ternak di 4 dusun yang ada di Kelurahan Sungai Pakning adalah 671 daftar kepemilikan. Dusun yang paling banyak jumlah kepemilikan hewan ternak dan unggas adalah dusun pakning asal dengan jumlah 273 dan di dusun ini jugalah banyak hewan ternak dan unggas yang berkeliaran di lingkungan umum tepatnya di Kelurahan Sungai Pakning. Hewan ternak dan unggas yang di soroti dalam penelitian ini adalah jenis hewan ternak sapi, kerbau, kambing, dan unggas

seperti ayam kampung, bebek dan lain lain yang kurang di jaga oleh pemiliknya sehingga mengganggu masyarakat. Penertiban hewan ternak dan unggas yang berkeliaran di tempat umum ini tentunya melanggar peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 tentang penertiban yang terdapat pada 19 ayat 1 dan 2.

Berdasarkan data diatas dapat kita temukan beberapa fenomena yang dijadikan acuan dalam melanjutkan penelitian ini. Dengan jumlah hewan ternak yang ada pada tabel diatas penulis berkeinginan untuk mengetahui dan menganalisa masalah penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh SATPOL PP, di antaranya sebahai berikut:

1. Masih ada terdapat hewan yang berkeliaran di perkarangan umum, yang dapat mengganggu jalan lalu lintas sebagai akses yang biasa di gunakan masyarakat.
2. Hewan ternak yang di lepaskan begitu saja ada yang masuk ke lingkungan perumahan warga, yang dapat merusak tanaman, halaman dan perkebunan warga Kelurahan Sungai Pakning.
3. Kotoran hewan ternak yang dilepaskan begitu saja menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga mengganggu kesehatan dan pernafasan masyarakat Kelurahan Sungai Pakning.
4. Masih banyak masyarakat yang tidak mengindah peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 yang terdapat pada pasal 19 ayat 1 dan 2 tentang penertiban hewan ternak.

Dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih tentang **“Pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban**

umum studi di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis.

Rumusan Masalah

“Bagaimana Pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan peraturan daerah Nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum studi di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis?

Tujuan dan kegunaan penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam upaya penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 dikecamatan bukit batu kabupaten bengkalis.

Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. **Kegunaan Teoritis**, yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya infestasi hasil-hasil penelitian dibidang administrasi, khususnya dibidang ilmu administrasi Negara.
- b. **Kegunaan Praktis**, Sebagai masukan kepada pemerintah baik itu dipemerintahan kecamatan maupun dipemerintahan kabupaten agar bisa menjadi acuan didalam melakukan sebuah perubahan didalam merumuskan sebuah kebijakan.
- c. **Kegunaan Akademis**, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau bahan informasi dan data skunder bagi kalangan akademis yang akan meneliti hal yang sama dan kasus yang sama.

STUDI KEPUSTAKAAN

Konsep Administrasi

Menurut Liang Gie (Pasalong, 2010:3) mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang didalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Syafri (2012:3) mengatakan administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor/kode sarat, pengetikan, penggadaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/insititusi.

Konsep Manajemen

Menurut Siagian (2003:5) manajemen didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu :

- a. Sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan daam rangka penerapan tujuan
- b. Kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.
- c. Selanjutnya Stoner (dalam Irham Fahmi 2011:2) mengatakan manajemen adalah proses pencatatan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian

upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.). Menurut Donovan dan Jackson, manajemen adalah sebagai proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, sebagai rangkaian kegiatan (skills) dan sebagai serangkaian tugas (didalam Pasalong, 2011:82)

Konsep Pelaksanaan

Menurut Pasolong (2008:57) Pelaksanaan adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik, sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program, dengan menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha usaha yang di laksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah di rumuskan dan di tetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat alat yang di perlukan , siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana yang harus di laksanakan. Menurut westa (1985 : 17)

Menurut Subarsono (2005:88) Pelaksanaan melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang oleh lipsky disebut “ street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group).

Operasionalisasi Variabel

Tabel 2 : konsep operasional Pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan perda no 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum studi di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis.

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Penilaian 4	Kategori 5
Pelaksanaan menurut Pasolong (2008:57) adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik, sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program, dengan menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.	Pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakkan perda nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum studi diKelurahan Sungai Pakning kecamatan bukitbatu kabupaten bengkalis.	1. Menentukan kebijakan, tujuan dan sasaran	1. berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama oleh pelaksana penertiban. 2. dapat di sesuaikan tupoksi unit pelaksana penertiban.	- terlaksana -cukup terlaksana -kurang terlaksana
		2. Keluaran kebijakan	1.dampak pencapaian target pelaksanaan penertiban belum terealisasi.	
		3. Implementer	1. kelompok pelaksana kebijakan (satpol pp) di tinjau dari system dan kewenangannya 2. penanggung jawab (UPIKA) unsur pimpinan kecamatan berdasarkan perda dan hukum.	
		4. Kelompok sasaran	1. seluruh masyarakat di Kelurahan Sungai Pakning. 2. masyarakat yang mata pencahariannya dengan beternak.	
		5. Dampak langsung	1. tercapainya tujuan dengan kinerja yang baik. 2. masyarakat yang sejahtera tanpa gangguan hewan atau yang sejenisnya.	
		6. Dampak	1. pelaksanaan dan	

		jangka menengah	realisasi secara terjadwal. 2. terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib.	
		7. Dampak jangka panjang	1. tata lingkungan jalan yang baik. 2. dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya .	
		8. Kinerja implementasi	1. berupa surat edaran berdasarkan keputusan kecamatan. 2. sosialisasi penertiban oleh satpol pp penanggung jawab (UPIKA) Unsur pimpinan kecamatan.	

Sumber : Modifikasi penulis 2015

Teknik Pengukuran

Terlaksana : apabila seluruh item penilaian pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis dapat terlaksana dengan baik atau berada pada rata rata persentase > 67 - 100%.

Cukup terlaksana : apabila hanya sebagian item penilaian pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan

peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis cukup terlaksana maka berada pada rata rata persentase > 34-66%.

Kurang terlaksana : apabila tidak satupun item penilaian pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten

bengkalis kurang
terlaksana maka
berada pada rata rata
persentase 1-33%

Sungai Pakning merupakan desa yang penduduknya lebih banyak dari 14 desa dan kelurahan lainnya yang ada dikecamatan bukit batu, disamping itu juga karena letak Kelurahan Sungai Pakning ini berbatasan langsung dengan kawasan pertamina dimana tempat hewan ternak itu ditertibkan, banyak permasalahan yang terjadi akibat hewan ternak yang di lepaskan begitu saja, tentunya mengganggu kesejahteraan masyarakat, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, masuk ke halaman rumah warga, mengganggu kebun milik warga, dari beberapa dampak pelepasan hewan ternak secara bebas masyarakat yang tidak memperdulikan peraturan daerah yang telah ada. dan juga karena dari hasil survei peneliti kasus penertiban hewan ternak sering terjadi ditempat penelitian yang dipilih oleh peneliti.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan kualitatif yakni metode penelitian yang berdasarkan pikiran-pikiran dan tanggapan dari informan penelitian berdasarkan koersioner mengenai permasalahan yang diteliti dari locus penelitian.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis, lokasi penelitian sengaja diambil di Kelurahan Sungai Pakning karena Kelurahan

Populasi dan Sampel

Tabel 3 : Jumlah Populasi dan sampel pelaksanaan penertiban hewan ternak oleh satpol pp di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis.

No.	Sub populasi	Populasi	Sampel	Jumlah %
1.	Camat bukit batu	1 Orang	1 orang	100 %
2.	Polsek bukit batu	1Orang	1 orang	100 %
3.	Kepala seksi kententraman dan ketertiban	1 Orang	1 orang	100%
4.	Kepala satpol pp kec.bukit batu	1 Orang	1 orang	100%
5.	Kepala Kelurahan Sungai Pakning	1 Orang	1 orang	100%
6.	Anggota SATPOL PP Kec. Bukit batu. Bidang ketertiban	9 Orang	9orang	100%
7.	Manager PT. pertamina sungai pakning	1 Orang	1 orang	100 %
8.	Masyarakat pemilik ternak Kelurahan Sungai Pakning	671 Orang	30 orang	4,47%
Jumlah		686Orang	45 orang Orang	6,42 %

Sumber olahan data, 2015

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang

didapatkan oleh peneliti lebih jelas dan akurat serta mendalam. Dan kemudian, teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau orang atau responden yang dianggap banyak tau tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

3. Angket/ Kuisisioner

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan tertulis pada responden.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan

menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen. Baik foto, rekaman, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan Pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah no 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum. (studi di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukitbatu kabupaten bengkalis.

1. Menentukan Kebijakan dan Sasaran

Tabel 4 : Tanggapan responden masyarakat pemilik ternak dalam menentukan kebijakan, tujuan dan sasaran upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Kebijakan tentang penegakan peraturan daerah no 27 tahun 1997.	20 (66.66%)	9 (30%)	1 (3.33%)	30
2	Menetapkan tujuan dan sasaran untuk ketertiban umum	17 (56.66%)	13 (43.33%)	0	30
3	Sasaran dari kegiatan penertiban	19 (63.33%)	11 (36.66%)	0	30
4	Kesepakatan dan keputusan bersama (UPIKA) unsur pimpinan kecamatan.	21 (70%)	8 (26.66)	1 (3.33%)	30
Jumlah		77	41	2	120
Rata-rata		19.25	10.25	0.5	30
Persentase		64.14%	34.16%	1.6%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala desa bapak Rahmad iwandi SH mengenai kebijakan tujuan dan sasaran dalam penertiban hewan ternak di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kami melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan perangkat desa, kepala Kelurahan Sungai Pakning telah menerima surat edaran berupa keputusan dari unsur

pimpinan kecamatan tahun lalu yang isinya mengenai larangan melepaskan hewan ternak sembarangan dan untuk di sosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kelurahan Sungai Pakning agar kebijakan yang dibuat tepat sasaran dalam prosesnya kami memperhatikan tujuan yang hendak kami capai adalah lingkungan yang bebas dari gangguan hewan ternak.

Tabel 5 : Tanggapan responden satpol pp kecamatan dalam menentukan kebijakan, tujuan dan sasaran upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Kebijakan tentang penegakan peraturan daerah no 27 tahun 1997.	6 (66.66%)	3 (33.33%)	0	9
2	Menetapkan tujuan dan sasaran untuk ketertiban umum	5 (55.55%)	3 (33.33%)	1 (11.11%)	9
3	Sasaran dari kegiatan penertiban	8 (88.88%)	1 (11.11%)	0	9
4	Kesepakatan dan keputusan bersama (UPIKA) unsur pimpinan kecamatan.	9 (100%)	0	0	9
Jumlah		28	7	1	36
Rata-rata		7	1.75	0.25	9
Persentase		77.77%	19.44%	2.77%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Akmaludin kepala seksi trantibum, (ketentraman dan ketertiban umum) memaparkan bahwa, sejak dikeluarkan surat edaran dari pihak kecamatan tahun yang lalu, sesuai dengan isinya dulunya kami sering

melakukan razia tentang hewan ternak ini 2 minggu sekali, dan rutin. Namun pada tahun ini, kami akan melakukan razia kelapangan setelah adanya laporan-laporan dari masyarakat tentang hewan ternak yang mengganggu ketertiban dimasyarakat

2. Keluaran Kebijakan

Tabel 6 : Tanggapan responden masyarakat pemilik ternak tentang keluaran kebijakan dalam upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Surat edaran oleh pihak kecamatan tentang larangan pelepasan hewan ternak	21 (70%)	8 (26.66%)	1 (3.33%)	30
2	Keluaran kebijakan	18 (60%)	10 (33.33%)	2 (6.66%)	30
Jumlah		39	18	3	60
Rata-rata		19.5	9	1.5	30
Persentase		65%	30%	5%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Kelurahan Sungai Pakning bapak rahmad iwandi SH. bahwa keluaran kebijakan yang dikeluarkan pihak kecamatan berupa edaran larangan dalam penertiban hewan ternak di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan

bukit-batu timbul karena adanya fenomena yang tampak jelas masih banyaknya hewan ternak yang dilepaskan secara sembarangan tanpa memperhatikan peraturan daerah tentang ketertiban umum

Tabel 7 : Tanggapan responden satpol pp tingkat kecamatan tentang keluaran kebijakan dalam upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Surat edaran oleh pihak kecamatan tentang larangan pelepasan hewan ternak	7 (77.77%)	1 (11.11%)	1 (11.11%)	9
2	Keluaran kebijakan	8 (88.88%)	1 (11.11%)	0	9
Jumlah		15	2	1	18
Rata-rata		7.5	1	0.5	9
Persentase		(83.33%)	(11.11%)	(5.55%)	100%

Sumber : olahan data penulis 2015

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak camat bukit-batu, M.fadlul wajdi, SSTP,M.Si. mengenai keluaran kebijakan tentang penertiban hewan ternak setiap desa, semuanya melalui edaran dari kecamatan, yang didalamnya berisikan kerja sama unsur

pimpinan kecamatan PT. pertamina, dan satpol pp sebagai unit eksekutor dalam melakukan kegiatan penertiban, dan dalam upaya menegakkan peraturan daerah tentang ketertiban umum kami menggerakkan satpol pp sebagai unit pelaksanaan kewenangannya.

3. Implementor

Tabel 8 : Tanggapan responden masyarakat pemilik ternak tentang implementor dalam upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	kewenangan satpol pp dalam melaksanakan tugasnya dalam penertiban	17 (56.66%)	12 (40%)	1 (3.33%)	30
2	Tugas kewenangan Satpol pp sabagai eksekutor lapangan	13 (43.33%)	15 (50%)	2 (6.66%)	30
3	Tentang kewenangan satpoll pp menetapkan penertiban 2 minggu 1 kali secara berkala	15 (50%)	13 (43.33%)	2 (6.66%)	30

4	Tentang wewenang satpol pp dalam tindak pemukulan kepada masyarakat pemilik ternak	21 (70%)	7 (23.33%)	2 (6.66%)	30
5	Kerja sama antara pihak kecamatan, kapolsek, satpol pp dan kepala desa	18 (60%)	10 (33.33%)	2 (6.66%)	30
6	Tentang kewenangan satpol pp dalam memberikan Himbauan aturan larangan tentang pelepasan hewan ternak	15 (50%)	12 (40%)	3 (10%)	30
Jumlah		99	69	12	180
Rata-rata		16.5	11.5	2	30
Persentase		55%	38.33%	6.66%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Adham selaku masyarakat pemilik ternak dan juga ketua Rt.03 Rw.01 tentang implementor dalam penertiban hewan ternak di Kelurahan Sungai Pakning ini menurutnya, masyarakat Kelurahan Sungai Pakning terutama pengguna jalan umum mendukung sekali dengan kegiatan penertiban yang direncanakan oleh pihak UPIKA, penertiban pernah

dilakukan namun belum selesai sampai tuntas, sehingga sampai saat ini masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di perkarangan umum tanpa adanya penjagaan. Namun untuk satpol pp sendiri dalam melakukan penertiban hewan ternak saya rasa sudah cukup efektif, namun kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pemilik ternak tidak mengindahkan aturan larangan yang telah dibuat.

Tabel 9 : Tanggapan responden satpol pp tingkat kecamatan tentang implementor dalam upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak terlaksana	
1	Kewenangan satpol pp dalam melaksanakan tugasnya dalam penertiban	9 (100%)	0	0	9
2	Tugas kewenangan Satpol pp sabagai eksekutor lapangan	8 (88.88%)	1 (11.11)	0	9
3	Tentang kewenangan satpol pp menetapkan penertiban 2 minggu 1 kali secara berkala,	9 (100%)	0	0	9
4	Tentang wewenang satpol pp dalam tindak pemukulan kepada masyarakat pemilik ternak,	7 (77.77%)	2 (22.22%)	0	9
5	Kerja sama antara pihak kecamatan, kapolsek, satpol pp	9 (100%)	0	0	

	dan kepala desa				
6	Tentang kewenangan satpol pp dalam memberikan Himbauan aturan larangan tentang pelepasan hewan ternak	9 (100%)	0	0	9
Jumlah		51	3	0	54
Rata-rata		8.5	0.5	0	9
Persentase		94.44%	5.55%	0	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala satpol pp kecamatan bukit batu bersama bapak Akmaludin mengenai implementor dalam penertiban hewan ternak diKelurahan Sungai Pakning ini, tindakan penertiban pernah kami lakukan , ada beberapa hewan ternak masyarakat yang kami tangkap dan

kami bawa ketempat lokasi penampungan hewan yang letaknya di perbatasan Kelurahan Sungai Pakning dengan pertamina, kemudian untuk masyarakat yang memiliki hewan ternak yang tertangkap kami panggil guna untuk diminta pertanggung jawaban.

4. Kelompok Sasaran

Tabel 10 : Tanggapan responden masyarakat pemilik ternak tentang kelompok sasaran upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Hewan ternak berdasarkan jenisnya yang berkeliaran di perkarangan umum	18 (60%)	12 (40%)	0	30
2	Masyarakat pemilik ternak dalam mematuhi aturan	4 (13.33%)	12 (40%)	14 (46.66%)	30
3	Sanksi /teguran dari pihak kecamatan untuk si pemilik ternak	16 (53.33%)	10 (33.33%)	4 (13.33%)	30
Jumlah		38	34	18	90
Rata-rata		12.66	11.33	6	30
Persentase		42.2%	37.76%	20%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Kelurahan Sungai Pakning bapak Acil Esyno . Mengenai kelompok sasaran dalam penertiban hewan ternak diKelurahan Sungai Pakning ini, pada proses pelaksanaannya memang pihak UPIKA dan kami aparaturnya telah melakukan penghimbau kepada

masyarakat desa untuk tidak membiarkan hewan ternak mereka dilepas begitu saja, dan kami telah menerima edaran dari pihak kecamatan bahwasannya satpol pp akan melaksanakan razia lapangan terhadap hewan ternak yang berkeliaran, hal ini bertujuan agar terciptanya ketertiban

umum , lingkungan yang bebas dari gangguan hewan ternak, namun ini terhambat karena kurangnya rasa

kesadaran dalam masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah ini.

Tabel 11 : Tanggapan responden satpol pp tingkat kecamatan tentang kelompok sasaran upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Hewan ternak berdasarkan jenisnya yang berkeliaran di perkarangan umum	8 (88.88%)	1 (11.11%)	0	9
2	Masyarakat pemilik ternak dalam mematuhi aturan	0	1 (11.11%)	8 (88.88%)	9
3	Sanksi /teguran dari pihak kecamatan untuk si pemilik ternak	7 (77.77%)	1 (11.11%)	1 (11.11%)	9
Jumlah		15	3	9	27
Rata-rata		5	1	3	9
Persentase		55.55%	11.11%	33.33%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala satpol pp kecamatan bukit batu, mengenai kelompok sasaran dalam penertiban hewan ternak di Kelurahan Sungai Pakning adalah masyarakat pemilik ternak dan hewan ternak itu sendiri, hewan ternak yang kami tangkap kemudian kami bawa ke tempat penampungan yakni dikawasan PT.

pertamina, jika dalam tempo satu minggu hewan ternak tersebut tidak diambil oleh si pemilik ternak , maka ternak tersebut akan kami serahkan kepada masyarakat yang kurang mampu dan bersedia memeliharanya dengan syarat mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah kecamatan.

5. Dampak Langsung

Tabel 12 : Tanggapan responden masyarakat pemilik ternak tentang dampak langsung upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Lingkungan yang tertib bebas dari gangguan hewan.	2 (6.66%)	10 (33.33%)	18 (60%)	30
2	Dampak secara langsung pada lingkungan warga masyarakat	13 (43.33%)	14 (46.66%)	3 (10%)	30

Jumlah	15	24	21	60
Rata-rata	7.5	12	10.5	30
Persentase	25%	40%	35%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wahabin masyarakat pemilik ternak dan warga masyarakat Kelurahan Sungai Pakning mengatakan mengenai dampak langsung dalam penertiban ini saya rasa belum tercipta lingkungan yang tertib yang bebas dari gangguan ternak, masih banyak saya jumpai hewan ternak seperti kambing, sapi dan

lain-lain masih berkeliaran tanpa unsur penjagaan. Hal ini berarti lemahnya pengawasan dari pelaksana penertiban, saya rasa jika tidak dibuat sanksi yang tegas maka tidak akan memberikan efek jera kepada masyarakat pemilik ternak dan tentunya lingkungan yang tertib sangat sulit untuk diciptakan.

Tabel 13 : Tanggapan responden satpol pp tingkat kecamatan tentang dampak langsung upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Lingkungan yang tertib bebas dari gangguan hewan.	7 (77.77%)	2 (22.22%)	0	9
2	Dampak secara langsung pada lingkungan warga masyarakat	1 (11.11%)	8 (88.88%)	0	9
Jumlah		8	10	0	18
Rata-rata		4	5	0	9
Persentase		44.44%	55.55%	0	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan wawancara dengan Polsek kecamatan bukit batu, mengenai dampak langsung dalam penertiban hewan ternak diKelurahan Sungai Pakning saya rasa belum terciptanya lingkungan yang tertib, karena ada satu faktor yang kurang tegas. yaitu masalah sanksi yang kurang tegas yang

ditetapkan pihak kecamatan, jika sanksi yang diberikan kepada masyarakat pemilik ternak adalah bersifat tegas dan memaksa seperti denda kurungan buat sipemilik ternak. Saya kira sangat memberikan efek jera kepada mereka khususnya kalangan peternak.

6. Dampak Jangka Menengah

Tabel 14 : Tanggapan responden masyarakat pemilik ternak tentang dampak jangka menengah upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Pelaksanaan dan realisasi secara terjadwal	16 (53.33%)	12 (40%)	2 (6.66%)	30
2	Terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib	15 (50%)	14 (46.66%)	1 (3.33%)	30
3	Peran stake holder yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan penertiban	10 (33.33%)	18 (60%)	2 (6.66%)	30
Jumlah		41	44	5	90
Rata-rata		13.66	14.66	1.6	30
Persentase		45.53%	48.86%	5.3%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan hasil wawancara, dengan ibu Anes selaku masyarakat Kelurahan Sungai Pakning juga termasuk masyarakat kalangan peternak, mengenai dampak jangka menengah dalam penertiban hewan ternak ini masih belum terciptanya lingkungan yang tertib dan bebas dari

gangguan hewan , saya melihat pada proses dan realisasinya, jika realisasi dan proses penertiban itu memang dilakukan secara rutin dan secara terus menerus. Maka saya yakin pasti akan memberikan dampak yang baik khususnya bagi lingkungan

Tabel 15 : Tanggapan responden satpol pp tingkat kecamatan tentang dampak jangka menengah upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis.

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Pelaksanaan dan realisasi secara terjadwal	7 (77.77%)	1 (11.11%)	1 (11.11%)	9
2	Terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib	6 (66.66%)	2 (22.22%)	1 (11.11%)	9
3	Peran stake holder yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan penertiban	9 (100%)	0	0	9
Jumlah		22	3	2	27
Rata- rata		7.33	1	0.6	9
Persentase		81.4%	11.11%	6.66%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala trantibum (ketentraman dan ketertiban umum) bapak Akmaludin mengenai dampak jangka menengah, saya lebih mengacu kepada proses secara terjadwal dan realisasinya, didalam melakukan razia turun

kelapangan, tentunya membutuhkan dana yang cukup, sementara dengan diadakan razia rutin haruslah memiliki anggaran tersendiri, menurut saya hal ini juga mempengaruhi didalam proses pelaksanaan penertiban hewan ternak ini.

7. Dampak Jangka Panjang

Tabel 16 : Tanggapan responden masyarakat pemilik ternak tentang dampak jangka panjang upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Memberikan dampak yang baik untuk jangka panjang	18 (60%)	12 (40%)	0	30
2	Dapat mengurangi angka kecelakaan setiap tahun	21 (70%)	9 (30%)	0	30
3	Lingkungan yang tertib dan sejahtera	13 (43.33%)	11 (36.66%)	6 (20%)	30
Jumlah		52	32	6	90
Rata-rata		17.33	10.66	2	30
Persentase		57.76%	35.53%	6.66%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu maryana masyarakat Kelurahan Sungai Pakning dan juga pemilik ternak, mengenai dampak jangka panjang untuk penertiban hewan ternak diKelurahan Sungai Pakning ini, saya rasa masih belum sejahtera untuk jangka panjang, jika dibandingkan

dengan tahun-tahun yang sebelumnya,ditahun ini bahkan lebih banyak ditemukan hewan yang berkeliaran diperkarangan umum, dan lebih parahnya masuk ke kebun-kebun warga dan ini tentunya merugikan masyarakat banyak.

Tabel 17 : Tanggapan responden satpol pp tingkat kecamatan tentang dampak jangka panjang upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Memberikan dampak yang baik untuk jangka panjang	2 (22.22%)	7 (77.77%)	0	9
2	Dapat mengurangi angka kecelakaan setiap tahun	8 (88.88%)	1 (11.11%)	0	9

3	Lingkungan yang tertib dan sejahtera	4 (44.44%)	4 (44.44%)	1 (11.11%)	9
Jumlah		14	12	1	27
Rata-rata		4.66	4	0.33%	9
Persentase		51.77%	44.44%	3.66%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hamdani salah satu anggota satpol pp kecamatan bukitbatu. Mengenai dampak jangka panjang penertiban hewan ternak diKelurahan Sungai Pakning ini, pernah terjadi kecelakaan yang dialami oleh anggota satpol pp , yang bertabrakan dengan hewan ternak yang ada dijalan umum,

dan juga ditahun ini juga pernah terjadi kecelakaan akibat menghindari hewan ternak di Gg nusantara Kelurahan Sungai Pakning. Untuk lingkungan yang tertib saya rasa perlunya rasa kesadaran dari si pemilik ternak untuk taat pada aturan yang dibuat, agar tidak merugikan orang lain.

8. Kinerja Implementasi

Tabel 18 : Tanggapan responden masyarakat pemilik ternak tentang kinerja implementasi dalam penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Surat edaran kerja sama memberikan pengaruh dalam jangka panjang	21 (70%)	8 (26.66%)	1 (3.33%)	30
2	Bentuk sosialisasi mengenai aturan dan larangan	15 (50%)	12 (40%)	3 (10%)	30
3	Satpol pp dan pihak kecamatan dalam bentuk kerja sama	16 (53.33%)	11 (36.66%)	3 (10%)	30
4	Kegiatan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat pemilik ternak	11 (36.66%)	18 (60%)	1 (3.33%)	30
Jumlah		63	49	8	120
Rata-rata		15.75	12.24	2	30
Persentase		52.5%	40.8%	6.66%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Kelurahan Sungai Pakning bapak Rahmad iwandi. SH mengenai kinerja implementasi dalam penertiban hewan ternak diKelurahan Sungai Pakning ini, saya rasa kerja sama antara pihak yang

terlibat dalam penertiban hewan ternak ini belum menunjukkan kerja sama yang efektif, dan juga mengenai sosialisasi yang pernah di edarkan diKelurahan Sungai Pakning belum semua kalangan masyarakat tahu hanya beberapa

masyarakat yang mengetahuinya, surat edaran yang berisikan larangan pelepasan hewan ternak yang pernah kami terima tahun lalu pernah kami

sosialisasikan dengan cara menghimbau kepada masyarakat ketika adanya agenda-agenda desa maupun rapat desa.

Tabel 19 : Tanggapan responden satpol pp tingkat kecamatan tentang kinerja implementasi upaya penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Surat edaran kerja sama memberikan pengaruh dalam jangka panjang	6 (66.66%)	2 (22.22%)	1 (11.11%)	9
2	Bentuk sosialisasi mengenai aturan dan larangan	8 (88.88%)	1 (11.11%)	0	9
3	Satpol pp dan pihak kecamatan dalam bentuk kerja sama	9 (100%)	0	0	9
4	Kegiatan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat pemilik ternak	6 (66.66%)	3 (33.33%)	0	9
Jumlah		29	6	1	36
Rata-rata		7.25	1.5	0.25	9
Persentase		80.55%	16.66%	2.77%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala trantibum (ketentraman dan ketertiban umum, bapak Akmaludin mengenai kinerja implementasi satpol pp dalam penertiban hewan ternak diKelurahan Sungai Pakning ini, pada prosesnya kami telah melakukan penertiban hewan ternak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam

surat edaran yaitu dua minggu sekali secara berkala, namun untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera dan tertib haruslah didasari dengan kesadaran masyarakat masing-masing untuk memelihara hewan ternak mereka dengan cara dikandangan agar tidak mengganggu ketentraman warga masyarakat.

Tabel 20 : Rekapitulasi responden masyarakat pemilik ternak terhadap pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Menentukan kebijakan tujuan dan sasaran	19.25 (64.14)	10.25 (34.16)	0.5 (1.6)	30
2	Keluaran kebijakan	19.5 (65%)	9 (30%)	1.5 (5%)	30
3	Implementor	16.5 (55%)	11.5 (38.33%)	2 (6.66%)	30

4	Kelompok sasaran	12.66 (42.66%)	11.33 (37.76)	6 (20%)	30
5	Dampak langsung	7.5 (25%)	12 (40%)	10.5 (35%)	30
6	Dampak jangka menengah	13.66 (45.53%)	14.66 (48.86%)	1.6 (5.3%)	30
7	Dampak jangka panjang	17.33 (57.76%)	10.66 (35.53%)	2 (6.66%)	30
8	Kinerja implementasi	15.75 (52.5%)	12.24 (40.8%)	2 (6.66%)	30
Jumlah		122.15	91.64	26.1	240
Rata-rata		15.26	11.45	3.26	30
Persentase		50.58%	38.16%	10.86%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Dari hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 50.58% sesuai dengan

penjelasan sebelumnya tentang persentase sebesar 34-67% termasuk dalam kategori cukup terlaksana.

Tabel 21 : Rekapitulasi responden satpol pp tingkat kecamatan terhadap pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakkan perda no 27 tahun 1997 (studi ketertiban umum) di Kelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis .

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Menentukan kebijakan tujuan dan sasaran	7 (77.77%)	1.75 (19.44%)	0.25 (2.77%)	9
2	Keluaran kebijakan	7.5 (83.33%)	1 (11.11%)	0.5 (5.55%)	9
3	Implementor	8.5 (94.44%)	0.5 (5.55%)	0	9
4	Kelompok sasaran	5 (55.55%)	1 (11.11%)	3 (33.33%)	9
5	Dampak langsung	4 (44.44%)	5 (55.55%)	0	9
6	Dampak jangka menengah	7.33 (81.4%)	1 (11.11%)	0.6 (0.6%)	9
7	Dampak jangka panjang	4.66 (51.77%)	4 (44.44%)	0.33 (3.66%)	9
8	Kinerja implementasi	7.25 (80.55%)	1.5 (16.66%)	0.25 (2.77%)	9
Jumlah		51.24	15.25	4.93	72
Rata-rata		6.40	1.90	0.61	9
Persentase		71.11%	21.11%	7%	100%

Sumber : olahan data penulis 2015.

Data diatas merupakan hasil jawaban responden masyarakat pemilik ternak yang berjumlah 9 orang. Dari hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan **Terlaksana** dengan persentase 71.11% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase sebesar 67-100% termasuk dalam kategori terlaksana.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan terhadap pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan perda no 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum yaitu dalam melakukan penertiban hewan ternak belumlah sepenuhnya dikatakan berhasil, dikarenakan masih banyaknya dijumpai hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum, jalan lintas dan bahkan masih banyak yang ditemukan masuk kepekarangan warga masyarakat. Penulis juga melihat kurang profesionalnya petugas pelaksana penertiban karena adanya hubungan internal (keluarga) antara petugas pelaksana, dengan masyarakat pemilik ternak sehingga sulitnya untuk menciptakan ketegasan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Untuk indikator menetapkan kebijakan, tujuan dan sasaran kesimpulan dalam kategori penilaian oleh responden masyarakat pemilik ternak adalah cukup terlaksana, kemudian untuk responden satpol pp mengenai indikator menetapkan kebijakan, tujuan dan sasaran kesimpulannya adalah terlaksana. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rahmad iwandi SH. Dan bapak Akmaludin mengenai indikator menetapkan kebijakan, tujuan dan sasaran kesimpulannya adalah terlaksana karena kebijakan yang dibuat oleh pihak kecamatan

sangat tepat karena memperhatikan kondisi lingkungan Kelurahan Sungai Pakning yang masih terdapat hewan ternak yang berkeliaran dijalan lintas maupun diperkarangan dan tempat umum. Jadi dapat disimpulkan mengenai indikator kebijakan, tujuan dan sasaran adalah terlaksana.

2. Untuk indikator keluaran kebijakan dalam kategori penilaian oleh responden masyarakat pemilik ternak kesimpulannya adalah cukup terlaksana, kemudian menurut tanggapan satpol pp mengenai indikator keluaran kebijakan kesimpulannya adalah terlaksana. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak kepala Kelurahan Sungai Pakning Rahmad iwandi SH. Dan bapak camat bukit batu M.fadlul wajdi, SSTP,M.Si, mengenai indikator keluaran kebijakan adalah terlaksana karena dengan alasan kebijakan yang dikeluarkan pihak kecamatan berupa surat edaran tentang larangan pelapasan ternak itu berdasarkan perda 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum dan dengan memperhatikan dan melihat fenomena yang tampak jelas yang ada diKelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit-batu yaitu begitu banyaknya hewan yang masih berkeliaran walaupun setelah kegiatan penertiban dilakukan. Jadi dapat disimpulkan mengenai indikator keluaran kebijakan adalah terlaksana.
3. Untuk indikator implementor dalam kategori penilaian oleh responden masyarakat pemilik ternak kesimpulannya adalah cukup terlaksana, kemudian menurut tanggapan satpol pp mengenai implementor kesimpulannya adalah terlaksana. Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak

- adham ketua Rt 03. Rw.01 juga sebagai masyarakat pemilik ternak dan bapak Akmaludin kepala seksi trantibum kecamatan mengenai implementor adalah kesimpulannya cukup terlaksana, karena meskipun kegiatan penertiban pernah dilakukan namun masih saja belum memberikan efek jera kepada masyarakat pemilik ternak karena sanksi yang diberikan tidak begitu pengaruh dan tidak tegas, buktinya masih banyak di jumpai hewan di lepas tanpa unsur penjagaan . jadi dapat disimpulkan untuk indikator implementor kelompok pelaksananya cukup terlaksana dengan beberapa alasan diatas.
4. Untuk indikator kelompok sasaran dalam kategori penilaian oleh responden masyarakat pemillik ternak kesimpulannya adalah cukup terlaksana, kemudian untuk responden satpol pp kecamatan mengenai indikator kelompok sasaran kesimpulannya adalah cukup terlaksana, namun berdasarkan hasil wawancara dengan kepala satpol pp kecamatan bukit batu dan bapak kepala Kelurahan Sungai Pakning mengenai kelompok sasaran dalam kesimpulannya adalah cukup terlaksana karena yang dianggap sebagai sasaran dalam proses penertiban itu adalah hewan-hewan ternak itu sendiri. meskipun seluruh hewan ternak yang berkeliaran di jalan bisa ditangkap dan ditertibkan, tidak menutup kemungkinan seluruh masyarakat pemilik ternak di Kelurahan Sungai Pakning taat pada aturan yang dibuat. Jadi dapat disimpulkan kesimpulan mengenai kelompok sasaran adalah cukup terlaksana.
 5. Untuk indikator dampak langsung dalam kategori penilaian oleh responden masyarakat pemilik ternak

- kesimpulannya adalah cukup terlaksana, kemudian untuk responden satpol pp kecamatan mengenai indikator dampak langsung kesimpulannya adalah cukup terlaksana, berdasarkan hasil wawancara bersama polsek kecamatan bukit batu dan bapak wahabin masyarakat Kelurahan Sungai Pakning dan juga si pemilik ternak mengenai dampak langsung kesimpulannya adalah cukup terlaksana. karena dampak langsung merupakan hasil dari proses pelaksanaan yang telah dilakukan secara langsung namun skala ukurannya dapat dilihat dari efektif atau tidaknya dari proses pelaksanaan itu sendiri. jadi dapat disimpulkan mengenai indikator dampak langung adalah cukup terlaksana.
6. Untuk indikator dampak jangka menengah dalam kategori penilaian oleh responden masyarakat pemilik ternak kesimpulannya adalah cukup terlaksana kemudian untuk tanggapan responden satpol pp kecamatan kesimpulannya adalah terlaksana, namun berdasarkan hasil wawancara penulis bersama bapak kepala seksi Trantibum, ketentraman dan ketertiban umum dan ibu anes sebagai masyarakat Kelurahan Sungai Pakning dan juga sebagai pemilik ternak mengungkapkan tentang proses dan realisasinya jika penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh petugas pelaksana memang benar benar secara rutin dan terus menerus maka akan memberikan dampak yang baik untuk lingkungan desa dan tentunya akan menciptakan ketertiban umum yang di ingin kan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan untuk indikator mengenai dampak jangka menengah adalah cukup terlaksana.

7. Untuk indikator dampak jangka panjang dalam kategori penilaian responden masyarakat pemilik ternak kesimpulannya adalah cukup terlaksana, kemudian untuk tanggapan responden satpol pp tingkat kecamatan kesimpulannya adalah cukup terlaksana, dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Maryana sebagai masyarakat Kelurahan Sungai Pakning dan juga sebagai pemilik ternak dan bersama bapak Hamdani anggota satpol pp kecamatan Bukit Batu, mengungkapkan tentang fenomena yang masih jelas tampak jelas, seperti pernah terjadi kecelakaan ditahun ini akibat keberadaan hewan yang dilepaskan begitu saja, belum lagi hewan ternak yang masuk ke pekarangan warga masyarakat, jadi dapat disimpulkan untuk kategori memberikan dampak jangka panjang adalah cukup terlaksana karena belum sepenuhnya dirasakan mencapai titik hasil yang diinginkan meskipun pelaksanaan penertiban itu pernah dilakukan.
8. Untuk indikator kinerja implementasi dalam kategori penilaian responden masyarakat pemilik ternak kesimpulannya adalah cukup terlaksana dan kemudian tanggapan satpol pp tingkat kecamatan mengenai kinerja implementasi kesimpulannya adalah terlaksana. dan berdasarkan hasil wawancara penulis bersama kepala seksi ketertarikan dan ketertiban umum dan bapak kepala Kelurahan Sungai Pakning Rahmad Iwandi SH. Mengungkapkan mengenai kinerja antara pihak kecamatan bersama unsur yang terlibat dalam proses pelaksanaan penertiban hewan ternak didesa ini belumlah menunjukkan kerja sama yang efektif dan efisien, dan juga mengenai sosialisasi yang

pernah di edarkan di Kelurahan Sungai Pakning belum semua kalangan masyarakat tahu hanya beberapa masyarakat yang mengetahuinya, surat edaran yang berisikan larangan pelepasan hewan ternak yang pernah kami terima tahun lalu pernah kami sosialisasikan dengan cara menghimbau kepada masyarakat ketika adanya agenda-agenda desa maupun rapat desa. dan keterangan dari satpol pp sendiri kami telah melakukan penertiban hewan ternak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam surat edaran yaitu dua minggu sekali secara berkala, namun untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera dan tertib haruslah didasari dengan kesadaran masyarakat masing-masing untuk memelihara hewan ternak mereka dengan cara dikandangkan agar tidak mengganggu ketentraman warga masyarakat. Jadi dapat disimpulkan untuk indikator kinerja implementasi kesimpulannya adalah cukup terlaksana.

Kesimpulan dari keseluruhan indikator dan berdasarkan tabel rekapitulasi masyarakat pemilik ternak di Kelurahan Sungai Pakning dan satpol pp tingkat kecamatan Bukit Batu adalah cukup terlaksana dengan beberapa alasan dasar, melihat pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum ini penulis menyimpulkan pada interval 34-67 % dengan kategori cukup terlaksana sebagai mana pada ketentuan ukuran pada bab 3 dan alasan dasar penulis memberikan kesimpulan ini dikarenakan jawaban responden masyarakat pemilik ternak dan satpol pp tingkat kecamatan dan penulis juga melihat bahwa dalam pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam

menengakkan perda ketertiban umum ini masih belum sepenuhnya efektif baik dari segi pelaksanaan kewenangan maupun dari segi tugas dan fungsinya, berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan pihak kecamatan pada tahun 2011 penulis melihat satpol pp belum sepenuhnya tepat waktu dalam menjalankan tugasnya sebagai eksekutor lapangan dalam melakukan penertiban hewan ternak hal ini dikarenakan kerja sama antara satpol pp dan upika belum cukup efektif sehingga belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Namun dalam melakukan pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan perda ketertiban umum ini penulis melihat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaannya diantaranya, Kurangnya kesadaran masyarakat pemilik ternak akan pentingnya arti ketertiban, yang dapat dilihat masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di jalan umum, Kurangnya ketegasan dari pihak pelaksana penertiban, kepada masyarakat pemilik ternak sehingga belum memberikan pengaruh yang begitu besar untuk menegakan ketertiban umum, dan Banyak diantara petugas yang melakukan penertiban memiliki hubungan keluarga dan saudara dengan masyarakat yang memiliki hewan ternak, tentu haruslah adanya ketegasan serta profesional dalam menjalankan kewajiban, sehingga untuk menengakkan ketertiban umum cukup sulit dan pada kasus ini penulis menarik kesimpulan berdasarkan jawaban responden dan observasi lapangan berada pada kategori cukup terlaksana.

Saran

1. Sebaiknya perlu diadakannya peninjauan ulang mengenai keputusan UPIKA (unsur pimpinan kecamatan) mengenai penertiban hewan ternak ini. Guna membangun kembali komunikasi yang baik antara aparat pemerintah yang ada dikecamatan Bukit Batu. Perlu diadakan kembali musyawarah yang melibatkan kesemua unsur pemerintahan yang ada dimasyarakat dan juga seluruh lapisan masyarakat guna mencari solusi penganggaran khusus tentang kebijakan mengenai penertiban hewan ternak dikecamatan Bukit Batu ini, dan penyediaan lahan khusus yang bisa digunakan oleh semua masyarakat yang memiliki profesi sebagai peternak, baik itu sebagai mata pencaharian utama maupun sebagai mata pencaharian tambahan. Agar usaha yang dimiliki masyarakat bisa benar-benar berkembang.
2. Perlu adanya pernyataan ketegasan dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam menangani permasalahan penertiban hewan ternak ini. Merilis kembali satuan tugas yang akan diberikan kepada unsur pelaksana penertiban supaya ada kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab antara unsur pengawasan. Disamping itu, sanksi juga harus dilaksanakan sesuai dengan hasil ketetapan bersama, demi terciptanya ketertiban sebaiknya semua aparat pemerintah yang berhubungan langsung dengan kebijakan penertiban hewan ternak ini, hendaknya memiliki profesionalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Tidak boleh adanya nilai-nilai diskriminasi didalam proses menetapkan sanksi.
3. Pendekatan kepada masyarakat harus ditingkatkan lagi. melalui langkah sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan yang telah

ditetapkan, ini juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Disamping itu pemerintah perlu melakukan langkah menjaring segala aspirasi yang ada didalam masyarakat, guna menselaraskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan program kebijakan yang akan pemerintah kecamatan maupun desa buat nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok Djamaludin 2012, *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*, Jakarta : Erlangga.
- Budiarjo Miriam 2008, *Dasar dasar Ilmu Politik*, Jakarta PT Gramedia : Pustaka Utama.
- Fahmi irham 2012. *Manajemen, teori, kasus. Dan solusi*. Bandung : alfabeta bantung
<http://www.bukupr.com/2012> (tentang hewan ternak)
- Purwanto Agus Erwan 2012, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gava Media.
- Siswanto 2013, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Syamsi Ibnu 2000, *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Subarsono 2009, *Analisi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Syafri Wirwan 2012, *Studi Tentang Administrasi Publik*, Jatinangor : Erlangga.
- Syafiie Inu Kencana 2013, *Sistem Administrasi Negara*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Syafiie Inu Kencana 2010, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sufian 1995, *Administrasi Organisasi Manajemen*, Pekanbaru : UIR Press.
- Syafiie Ibnu Kencana 2010, *Ilmu Politik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sufian 1995. *administrasi organisasi manajemen*, pekanbaru: UIR Press.
- Sugiono 2010, *metode penelitian administrasi*, bandung :alfabeta bandung
- Sule tisnawati dan saefullah kurniawan 2013, Jakarta : kencana prenadamedia
- Terry George R 2009, *prinsip prinsip manajemen*, Jakarta : bumi aksara
- Thoha Miftah 2010, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta : Pranada Media Group.
- Zulkifli 2005, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Manajemen*, Pekanbaru : UIR Press.

Dokumentasi :

- Dokumentasi foto hewan ternak saat penelitian
- Surat edaran (sosialisasi hasil keputusan bersama UPIKA, unsur pimpinan kecamatan dan PT. Pertamina sungai pakning 21 januari 2011
- peraturan daerah kabupaten bengkalis nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum
- Peraturan pemerintah nomor 06 tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja.
- Buku Pedoman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2006. *Pedoman penyusunan Proposal*. Universitas Islam Riau.